

BAB II

KEPANITERAAN

A. KEADAAN PERKARA

1) Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana.

Adapun jumlah perkara yang diterima, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perkara Pidana Kejahatan

- Sisa Tahun 2018 : 3 Perkara
- Masuk Tahun 2019 : 44 Perkara
- Putus Tahun 2019 : 45 Perkara
- Sisa Tahun 2019 : 2 Perkara

2. Perkara Pidana Pelanggaran

- Sisa Tahun 2018 : 0 Perkara
- Masuk Tahun 2019 : 9 Perkara
- Putus Tahun 2019 : 9 Perkara
- Sisa Tahun 2019 : 0 Perkara

Keadaan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Nama	Sisa Awal	Perkara Masuk	Perkara yang di putus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana	3	44	45	2	Dua perkara masih dalam proses persidangan
2	Pelanggaran	0	9	9	0	

a) Sisa Perkara Awal Tahun 2019

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki sisa perkara awal tahun, yaitu sisa akhir tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	NOMOR REGISTER	NAMA/PANGKAT/NRP/JABATAN/KESATUAN	MATRA	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI DELIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	44-K/PM.III-13/AD/XII/2018 13/12/2018	Yuni Subiantoro Pelda 21960252969674 Babinminvetcaddam V/Brawijaya	AD	Pasal 49 huruf a atau Pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 tahun 2004.	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
2	45-K/PM.III-13/AU/XII/2018 17/12/2018	Ahmad Khairudin Peltu 511870 Depohar 50 Adi Sumarmo	AU	pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009	Kecelakaan Lalu-Lintas	
3	46-K/PM.III-13/AD/XII/2018 17/12/2018	Septian Amukti Susanto Prada 31170677060998 Ynnarmed 3/105 Tarik	AD	Pasal 310 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009	Kecelakaan Lalu-Lintas	

b) Perkara Masuk Tahun Anggaran 2019

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-12 Madiun sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara, yang terdiri dari, Perkara Kejahatan 44 (empat puluh empat) Perkara, Perkara Pelanggaran 9 (sembilan) perkara dan Sisa Awal Perkara 2019 ada 3 (tiga) perkara, dengan perincian jenis perkara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk
1	2	3	4
1	Desersi	0	15
2	Pemalsuan Surat	0	1
3	Tidak Mentaati Perintah Dinas	0	1
4	Pencurian dan Penadahan	0	1
5	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	1
6	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	4
7	Pembunuhan	0	1
8	Penganiayaan	0	3
9	Pencurian	0	1
10	Penipuan	0	3
11	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	1
12	Kecelakaan Lalu-Lintas	2	6
13	Ketidakhadiran Tanpa Ijin	0	6
14	Pelanggaran Lalu-Lintas	0	9
15	Lain-Lain	0	0
Total		3	53

c) Perkara Yang Diputus Pada Tahun Anggaran 2019

Pada tahun anggaran 2019 perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara, terdiri dari Perkara Kejahatan sebanyak 45 (empat puluh lima) Perkara dan Perkara Pelanggaran sebanyak 9 (sembilan) Perkara, dengan kualifikasi perkara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
1	2	3	4	5
1	Desersi	0	15	14
2	Pemalsuan Surat	0	1	1
3	Tidak Mentaati Perintah Dinas	0	1	1
4	Pencurian dan Penadahan	0	1	1
5	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	1	1
6	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	4	4
7	Pembunuhan	0	1	1
8	Penganiayaan	0	3	3
9	Pencurian	0	1	1
10	Penipuan	0	3	2
11	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	1	2
12	Kecelakaan Lalu-Lintas	2	6	8
13	Ketidakhadiran Tanpa Ijin	0	6	6
14	Pelanggaran Lalu-Lintas	0	9	9
15	Lain-Lain	0	0	0
Total		3	53	54

d) Sisa Akhir Perkara Pada Tahun Anggaran 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Sisa Akhir Perkara Pada Tahun Anggaran 2019 sebanyak 2 (Dua) Perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	NOMOR REGISTER	NAMA/PANGKAT/NRPI/ JABATAN/KESATUAN	MATRA	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI DELIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	39-K/PM.III- 13/AL/X/2019 02-10-19	Riwayanto Serma (Mar) 58019 Kolatmar	AL	pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Penipuan	Masih dalam proses persidangan
2	44-K/PM.III- 13/AD/XII/2019 19-12-19	Andik Prasetyo Kopda 31040697310484 Kodim 0802 Ponorogo	AD	Pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM	Desersi	Masih dalam proses persidangan

2). Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pada anggaran tahun 2019, dari jumlah 54 (lima puluh empat) perkara yang diputus terdapat 9 (sembilan) perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding, antara lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN BANDING	NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN	NAMA/PANGKAT/N RP/ JABATAN/KESATU AN	MELANGGAR PASAL	PEMOHON BANDING	KET
1	2	3	4	5	7	8
1	APB/44-K/PM.III- 13/AD/III/2019 15/03/2019	44-K/PM.III- 13/AD/XII/20 11/03/2019	Yuni Subiyantoro Pelda 2196025296967 Babinminvetcaddam V/Brawijaya	Pasal 49 huruf a atau Pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 tahun 2004	Terdakwa	
2	APB/5-K/PM.III- 13/AD/V/2019 15/05/2019	5-K/PM.III- 13/AD/II/201 9 15/05/2019	Siswanto Serka 319402766440773 Kodim 0805/Ngawi	kesatu : 281 ke-1 KUHP dan Kedua : 284 ayat (1) ke-2 a KUHP	Terdakwa: Siswanto	
3	APB/11-K/PM.III- 13/AD/V/2019 13/05/2019	11-K/PM.III- 13/AD/II/201 9 07/05/2019	Hendro Subeno Serma 3910650000771 Kodim 0803/Madiun;Sudars ono Serda 613134 Kodim 080-3/Madiun	pasal 378 KUHP	Terdakwa: Hendro Subeno	
4	APB/16-K/PM.III- 13/AD/V/2019 27/05/2019	16-K/PM.III- 13/AD/IV/20 19 21/05/2019	Ilham Alfi Nurdiansyah Pratu 31130540540694 Pendani V/BRW	Primair : 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 Subsidair : 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009	Terdakwa: Ilham Alfi Nurdiansyah	

5	APB/29-K/PM.III-13/AD/VIII/2019 21/08/2019	29-K/PM.III-13/AD/VII/2019 21/08/2019	Subagiyo Serka 3,19501E+13 Kodim 0805/Ngawi	Pasal 310 ayat (3) Jo. Ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan	Oditur: Ismiyanto,S H	
6	APB/36-K/PM.III-13/AD/XI/2019 12/11/2019	36-K/PM.III-13/AD/VIII/2019 07/11/2019	Sugeng Kurniawan Kopda 3,10404E+13 Kodim 1709/Yawa	Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. Lebih Subsidair : Sebagaimana	Sugeng Kurniawan. Kuasa dari Terdakwa: Sugeng Kurniawan	
7	APB/38-K/PM.III-13/AD/X/2019 17/10/2019	38-K/PM.III-13/AD/X/2019 17/10/2019	Sigit Murbiyanto Serda 3,10106E+14 Minvetcatdam V/05 BRW	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Oditur: Sutrisno,S H	
8	APB/40-K/PM.III-13/AD/XI/2019 12/11/2019	40-K/PM.III-13/AD/X/2019 05/11/2019	Abdul Haris Manapa Kopda 3,10307E+13 Yonif 511/DY	pasal 351 ayat (1) KUHP	Terdakwa: Abdul Haris Manapa	
9	APB/43-K/PM.III-13/AU/XII/2019 02/12/2019	43-K/PM.III-13/AU/X/2019 02/12/2019	Andrias Dwi Prasetyo Serma 526534 wing udara 3 Lanud Iswahjudi	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2)	Oditur: Ismiyanto,S H	

3) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada anggaran tahun 2019, terdapat 8 (delapan) perkara mengajukan Upaya Hukum Kasasi, antara lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL AKTA PERMOHONAN KASASI	NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN	NAMA/ PANGKAT/NRP/ JABATAN/ KESATUAN	MELANGGAR PASAL	PEMOHON KASASI	KET
1	2	3	4	5	7	8
1	APK/29-K/PM.III-13/02/2019	29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018/27/11/2018	Tono Kopka/84368 Arsenal Mabasal	pasal 167 ayat (1) KUHP	Terdakwa: Tono	BHT
2	APK/34-K/PM.III-21/01/2019	34-K/PM.III-13/AL/IX/2018/08/11/2018	Nizar Matofani Serda Kom/116084 Lantamal II	Pasla 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalm	Oditur: Ismiyanto, S.H.	BHT
3	APK/40-K/PM.III-30/01/2019	40-K/PM.III-13/AL/X/2018/13/11/2018	Hadi Untoyo Serka/63239 Denma Lantamal V	Pasal 378 KUHP	Terdakwa: Hadi Untoyo	BHT
4	APK/44-K/PM.III-14/05/2019	44-K/PM.III-13/AD/XII/2018/11/03/2019	Yuni Subiyantoro Pelda 21960252969674 Babinminvetcaddam V/Brawijaya	Pasal 49 huruf a atau Pasal 44 ayat (4) UU RI nomor 23 tahun 2004	Terdakwa: Yuni Subiyantoro	BHT
5	APK/5-K/PM.III-13/AD/VII/2019/16/07/2019	5-K/PM.III-13/AD/II/2019/15/05/2019	Siswanto Serka 319402766440773 Kodim 0805/Ngawi	kesatu : 281 ke-1 KUHP dan Kedua : 284 ayat (1) ke-2 a KUHP	Oditur: Sutrisno, S.H.	BHT
6	APK/11-K/PM.III-30/07/2019	11-K/PM.III-13/AD/II/2019/07/05/2019	Hendro Subeno (Terdakwa I) Serma 3910650000771 Kodim 0803/Madiun Sudarsono (Terdakwa II) Serda 613134 Kodim 0803/Madiun	pasal 378 KUHP	Terdakwa: Hendro Subeno (Terdakwa I), Sudarsono (Terdakwa II)	BHT
7	APK/38-K/PM.III-12/12/2019	38-K/PM.III-13/AD/X/2019/17/10/2019	Sigit Murbiyanto Serda 310106355211281 Minvetcatdam V/05 BRW	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Oditur: Sutrisno, S.H.	Proses Administrasi
8	APK/36-K/PM.III-26/12/2019	36-K/PM.III-13/AD/VIII/2018/07/11/2019	Sugeng Kurniawan Kopda 31040431320485 Kodim 1709/Yawa	Primair : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Subsida: : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. Lebih Subsida: : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP	Terdakwa : Sugeng Kurniawan	Proses Administrasi

4) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak ada perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali.

No	Nomor dan Tanggal Akta Permohonan Peninjauan Kembali	Nomor dan Tanggal Register Perkara	Nama/ Pangkat/NRP/ Jabatan/ Kesatuan	Melanggar Pasal	Pemohon Peninjauan kembali
1	2	3	4	5	8
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

B. PENYELESAIAN PERKARA

1) Jumlah sisa perkara yang diputus

Pada tahun anggaran 2019, terdapat sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	NOMOR REGISTER	NAMA/PANGKAT/NRP/ JABATAN/KESATUAN	MATRA	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI DELIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	39-K/PM.III- 13/AL/X/2019 02/10/2019	Riwayanto Serma (Mar) 58019 Kolatmar	AL	Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Penipuan	
2	44-K/PM.III- 13/AD/XII/2019 19/12/2019	Andik Prasetyo Kopda 31040697310484 Kodim 0802 Ponorogo	AU	Pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM	Desersi	

2) Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.

Perkara putus pada tahun anggaran 2019 sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara, terdiri dari Perkara Kejahatan sebanyak 46 (empat puluh enam) perkara dan Perkara Pelanggaran sebanyak 9 (sembilan) perkara, dengan kualifikasi perkara sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus
1	2	3	4	5
1	Desersi	0	15	14
2	Pemalsuan Surat	0	1	1
3	Tidak Mentaati Perintah Dinas	0	1	1
4	Pencurian dan Penadahan	0	1	1
5	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	1	1
6	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	0	4	4
7	Pembunuhan	0	1	1
8	Penganiayaan	0	3	3
9	Pencurian	0	1	1
10	Penipuan	0	3	2
11	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	1	2
12	Kecelakaan Lalu-Lintas	2	6	8
13	Ketidakhadiran Tanpa Ijin	0	6	6
14	Pelanggaran Lalu-Lintas	0	9	9
15	Lain-Lain	0	0	0
Total		3	53	54

3) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dsan PK Pada tahun anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara masuk pada tahun anggaran 2019 sebanyak 56 (lima puluh enam) perkara dan telah diputus sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara, dari 54 (lima puluh empat) perkara yang diputus, perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

Banding, Kasasi Dan PK sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) perkara antara lain sebagai berikut :

No	Tanggal Terima	Nomor Register	Tanggal Perbuatan	Nomor/Tanggal Skepera	Nama/Pangkat/NRP/ Jabatan/Kesatuan	Pasal Dakwaan	Nomor dan Tanggal Putusan	Ket
1	2	3	4	5	6	7		9
1	17/12/2018	45-K/PM.III-13/AU/XII/2018 17/12/2018	Pada tanggal tiga puluh bulan juni tahun dua ribu delapan belas	Kep/03/XII/2018 05/12/2018	Ahmad Khairudin Pelitu 511870 Depohar 50 Adi Sumarmo	pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009	45-K/PM.III-13/AU/XII/2018 28/01/2019	BHT 08/02/2019
2	17/12/2018	46-K/PM.III-13/AD/XII/2018 17/12/2018	pada hari kamis tanggal dua puluh satu bulan juni tahun dua ribu delapan belas	Kep/249/XI/2018 30/11/2018	Septian Amukti Susanto Prada 31170677060998 Ynnarmed 3/105 Tarik	Pasal 310 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009	46-K/PM.III-13/AD/XII/2018 07/02/2019	BHT 15/02/2019
3	21/01/2019	1-K/PM.III-13/AU/I/2019 21/01/2019	Pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas	Kep/01/I/2018 10/01/2019	Anggi Syahputra Pratu 542711 Senkom Lanud Iswahjudi	310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1-K/PM.III-13/AU/I/2019 04/03/2019	BHT 12/03/2019
4	28/01/2019	2-K/PM.III-13/AD/I/2019 28/01/2019	Yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas	Kep/09/XII/2018 21/12/2018	Taslim Budjang Kopda 31040766031083 Yonif Mekanisme 521/DY	Pasal 86 ke-1 KUHPM	2-K/PM.III-13/AD/I/2019 25/02/2019	BHT 05/03/2019
5	28/01/2019	3-K/PM.III-13/AU/I/2019 28/01/2019	Pada tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal; tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas	Kep/03/I/2019 22/01/2019	Fahrul Numansyah Pratu 541704 Lanud Iswahjudi	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	3-K/PM.III-13/AU/I/2019 25/04/2019	BHT 03/05/2019
6	11/02/2019	4-K/PM.III-13/AD/II/2019 11/02/2019	Pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan september tahun dua ribu delapan belas	Kep/460/XII/2018 18/12/2018	Thaiti Mega Yulied Saputra Praka 31071391350787 Kodiklad	Pasal 480 ke-1 KUHP	4-K/PM.III-13/AD/II/2019 27/02/2019	BHT 27/02/2019
7	13/02/2019	6-K/PM.III-13/AL/II/2019 13/02/2019	Pada hari senin tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu delapan belas	Kep/03/I/2019 11/01/2019	Hepi Candra Baruna Saputra Koptu Ttu 100310 KRI AMY -351	363 ayat (1) ke-5 KUHP	6-K/PM.III-13/AL/II/2019 25/04/2019	BHT 03/05/2019
8	13/02/2019	7-K/PM.III-13/AL/II/2019 13/02/2019	pada hari selasa tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu delapan belas	Kep/02/I/2019 11/01/2019	Hepi Candra Baruna Saputra Koptu Ttu 100310 KRI AMY -351	351 ayat (1)	7-K/PM.III-13/AL/II/2019 25/04/2019	BHT 03/05/2019

9	15/02/2019	8-K/PM.III-13/AD/II/2019 15/02/2019	Pada bulan april tahun dua ribu tujuh belas ,bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas dan bulan agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan maret tahun dua ribu delapan belas.	Kep/01/II/2019 18/01/2019	Bagus Handoko Kopda 31030644930483 Kodim 0801/Pacitan	Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP	8-K/PM.III-13/AD/II/2019 22/04/2019	BHT 30/04/2019
10	15/02/2019	9-K/PM.III-13/AD/II/2019 15/02/2019	Sejak tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan empat belas bulan nopember tahun dua ribu delapan belas	Kep/228/XII/2018 17/12/2018	Andyn Suprayitno Koptu 31980225540479 Denbekang V-44-01 Bekangdam V /Brawijaya	Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM	9-K/PM.III-13/AD/II/2019 25/04/2019	BHT 03/05/2019
11	15/02/2019	10-K/PM.III-13/AL/II/2019 15/02/2019	pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas	Kep/19/XII/2018 31/12/2018	Jaja Priatnajaya Serka Saa 73033 Satkoarmada II	279 ayat (1) KUHP	10-K/PM.III-13/AL/II/2019 07/05/2019	BHT 15/05/2019
12	21/02/2019	12-K/PM.III-13/AD/II/2019 21/02/2019	pada tanggal dua puluh enam bulan agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas	Kep/02/II/2019 18/01/2019	Yogi Asmoro Bayu Pradana Praka 31071051440788 Yonif 511/DY	87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM	12-K/PM.III-13/AD/II/2019 25/04/2019	BHT 03/05/2019
13	15/03/2019	13-K/PM.III-13/AD/III/2019 15/03/2019	Pada tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua Ribu delapan belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas	Kep/13/II/2019 28/02/2019	Ferly Lauhenapessy Pratu 31150575680297 Yonif 511/DY	Pasal 86 ke-1 KUHPM	13-K/PM.III-13/AD/III/2019 11/04/2019	BHT 22/04/2019
14	28/03/2019	14-K/PM.III-13/AD/III/2019 28/03/2019	pada hari senin tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal sembilan belas januari tahun dua ribu sembilan belas	Kep/42/III/2019 08/03/2019	Surya Pratama Pratu 311101010777289 Yonzipur 5/ABW	86 ke-1 KUHPM	14-K/PM.III-13/AD/III/2019 15/05/2019	BHT 23/05/2019

15	02/04/2019	15-K/PM.III-13/AD/IV/2019 02/04/2019	pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas	Kep/03/IV/2019 29/03/2019	M. Heri Susanto Serda 3103200811282 Kodim 0812/Lamongan	Kesatu : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Atau Kedua : Pasal 280 Ayat (3) Jo Pasal 494 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.	15-K/PM.III-13/AD/IV/2019 11/04/2019	BHT 22/04/2019
16	16/04/2019	17-K/PM.III-13/AD/IV/2019 16/04/2019	Sejak tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas	Kep/67/III/2019 18/03/2019	EKo Sutrisno Praka 31090510151089 Yonzipur 5/ABW	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.	17-K/PM.III-13/AD/IV/2019 26/06/2019	BHT 04/07/2019
17	16/04/2019	18-K/PM.III-13/AU/IV/2019 16/04/2019	Pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas	Kep/04/IV/2019 05/04/2019	Azis Mahmud Ajisoko Serda 544177 Depohar 60	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.	18-K/PM.III-13/AU/IV/2019 26/06/2019	BHT 04/07/2019
18	16/04/2019	1-P/PM.III-13/AD/IV/2019 16/04/2019	pada Hari Rabu tanggal dua puluh maret tahun dua ribu sembilan belas	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Hermawan Pelda 21970088790476 Kodim 0802 Ponorogo	Pasal 288 Ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009	1-P/PM.III-13/AD/IV/2019 22/04/2019	BHT 29/04/2019
19	16/04/2019	2-P/PM.III-13/AD/IV/2019 16/04/2019	Pada hari rabu tanggal dua puluh Maret tahun dua ribu sembilan belas	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Suratmin Kopda 31020742450782 Kodim 0801 Pacitan	Pasal 288 Ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009	2-P/PM.III-13/AD/IV/2019 22/04/2019	BHT 29/04/2019
20	03/05/2019	19-K/PM.III-13/AD/IV/2019 03/05/2019	Pada tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu delapan belas	Kep/22/IV/2019 18/04/2019	Marzuki Serma 3910659920672 Kodim 0805 Ngawi	pasal 378 KUHP	19-K/PM.III-13/AD/IV/2019 10/07/2019	BHT 18/07/2019
21	21/05/2019	20-K/PM.III-13/AU/IV/2019 21/05/2019	pada tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu sembilan belas	Kep/22/IV/2019 07/05/2019	Suryanto Budi Prasetyo Peltu 517211 Lanud Iswahjudi	pasal 86 ke-1 KUHP.	20-K/PM.III-13/AU/IV/2019 28/05/2019	BHT 05/06/2019

22	21/05/2019	21-K/PM.III-13/AD/V/2019 21/05/2019	tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan maret tahun dua ribu sembilan belas	Kep/05/V/2019 09/05/2019	Jemi Dwi Widodo Koptu 31000227260781 Kodim 0812 Lamongan	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.	21-K/PM.III-13/AD/V/2019 26/07/2019	BHT 06/08/2019
23	23/05/2019	22-K/PM.III-13/AD/V/2019 23/05/2019	Pada Hari Jumat tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas	Kep/114/V/2019 16/05/2019	Jasman Serma 31930819100273 Denpom V/! Pomdam V/BRW	Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	22-K/PM.III-13/AD/V/2019 23/07/2019	BHT 31/07/2019
24	23/05/2019	23-K/PM.III-13/AD/V/2019 23/05/2019	sejak tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas	Kep/115/V/2019 16/05/2019	Surya Pratama Pratu 311101077289 Yonzipur 5/ABW	87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM	23-K/PM.III-13/AD/V/2019 26/07/2019	BHT 06/08/2019
25	17/06/2019	24-K/PM.III-13/AD/V/2019 17/06/2019	Pada Hari Senin tanggal Delapan belas bulan Pebruari tahun dua ribu sembilan belas	Kep/10/V/2019 21/05/2019	Haris Salpiko Sertu 31000255881079 Yonif Mekanis 521/DY	Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Untas dan Angkutan Jalan.	24-K/PM.III-13/AD/V/2019 25/07/2019	BHT 02/08/2019
26	20/06/2019	25-K/PM.III-13/AD/V/2019 20/06/2019	sejak tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tujuh bulan april tahun dua ribu sembilan belas	Kep/23/V/2019 13/05/2019	Sudarsono Serda 31960587740375 Kodim 0805 Ngawi	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	25-K/PM.III-13/AD/V/2019 10/07/2019	BHT 18/07/2019
27	03/07/2019	26-K/PM.III-13/AD/VII/2019 03/07/2019	Pada bulan Januari dan bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas atau setidaknya tidaknya pada tahun Dua Ribu Tujuh Belas.	Kep/07/V/2019 24/06/2019	Rendy Widiasto Pratu 31130139440491 Korem 082/CPYJ	Pasal 281 ke-1 KUHP	26-K/PM.III-13/AD/VII/2019 08/08/2019	BHT 16/08/2019
28	09/07/2019	27-K/PM.III-13/AD/VII/2019 09/07/2019	pada tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas	Kep/24/V/2019 19/06/2019	Moch.Supriyono Kopka 31930728850973 Kodim 0808 Blitar	Pasal 310 ayat (2) UU RI no.22 tahun 2019 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan	27-K/PM.III-13/AD/VII/2019 10/10/2019	BHT 18/10/2019

29	10/07/2019	28-K/PM.III-13/AD/VII/2019 10/07/2019	pada tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun duaribu sembilan belas	Kep/25/VI/2019 27/06/2019	Edi Jumar Sertu 31960796300276 Kodim 0807 Tulungagung	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.	28-K/PM.III-13/AD/VII/2019 12/09/2019	BHT 20/09/2019
30	29/07/2019	30-K/PM.III-13/AD/VII/2019 29/07/2019	pada tanggal tujuh belas bulan April tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas	Kep/27/VII/2019 18/07/2019	Dwi Waluyo Sertu 319805890520676 Korem 081/Dsj	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.	30-K/PM.III-13/AD/VII/2019 23/09/2019	BHT 01/10/2019
31	30/07/2019	31-K/PM.III-13/AD/VII/2019 30/07/2019	Pada tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan mei tahun dua ribu sembilan belas	Kep/26/VII/2019 18/07/2019	Edi Siswo Palipurnomo Koptu 31020193000880 Yonif 511/DY	86 ke-1 KUHPM	31-K/PM.III-13/AD/VII/2019 21/08/2019	BHT 29/08/2019
32	23/08/2019	32-K/PM.III-13/AU/VIII/2019 23/08/2019	Pada bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dan bulan April tahun dua ribu sembilan belas	Kep/11/VIII/2019 12/08/2019	Novan Bagus Arias Putra Kopda 534681 Wing I Paskhas	Kesatu : Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP dan Kedua : Pasal 6 jo Pasal 32 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi	32-K/PM.III-13/AU/VIII/2019 04/11/2019	BHT 12/11/2019
33	23/08/2019	33-K/PM.III-13/AD/VIII/2019 23/08/2019	Tanggal Dua puluh satu bulan Mei Tahun Dua ribu sembilan belas	Kep/29/VIII/2019 09/08/2019	Nyamianto Kopda 31050355820885 Yonif 511/DY	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Ke-1 KUHPM	33-K/PM.III-13/AD/VIII/2019 23/10/2019	BHT 31/10/2019
34	27/08/2019	34-K/PM.III-13/AU/VIII/2019 27/08/2019	Tanggal enambelas bulan april tahun duaribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu sembilan belas	Kep/36/VIII/2019 21/08/2019	Andrias Dwi Prasetyo Serma 526534 Lanud Iswahjudi	Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM	34-K/PM.III-13/AU/VIII/2019 24/10/2019	BHT 1/11/2019

35	27/08/2019	35-K/PM.III-13/AU/VIII/2019 27/08/2019	Pada Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan	Kep/10/VIII/2019 20/08/2019	Setiyo Wijanarko Kapten Kes 522790 Lanud Yohanis Kapiwau	Pasal 263 Ayat (1) KUHP	35-K/PM.III-13/AU/VIII/2019 02/12/2019	BHT 10/12/2019
36	30/08/2019	37-K/PM.III-13/AD/VIII/2019 30/08/2019	Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas	Kep/13/VIII/2019 22/08/2019	Mohammad Dandi Ariski Prada 31180191101098 Yonif Mekanis 521/DY	Pasal 87 Ayat (1) ke-(2) Jo Ayat (2) KUHPM	37-K/PM.III-13/AD/VIII/2019 21/10/2019	BHT 29/10/2019
37	07/10/2019	41-K/PM.III-13/AD/X/2019 07/10/2019	Pada hari minggu tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas	Kep/36/IX/2019 27/09/2019	Muhamad Isma Miftakhul Ulun Serka 21070444280385 Yonif 511/DY	pasal 351 ayat (1) KUHP	41-K/PM.III-13/AD/X/2019 05/11/2019	BHT 13/11/2019
38	07/10/2019	42-K/PM.III-13/AD/X/2019 07/10/2019	Pada bulan Nopeber tahun dua ribu delapan belas sampai dengan sekarang	Kep/402/IX/2019 27/09/2019	Suprayitno Kopda 31060231160184 Kodim 1701/Jayapura	Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga	42-K/PM.III-13/AD/X/2019 04/11/2019	BHT 12/11/2019
39	11/11/2019	3-P/PM.III-13/AD/XI/2019 11/11/2019	pada hari Selasa tanggal 29 oktober tahun dua ribu sembilan belas	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Adi Firdaus Koptu 31010614750780 Yonif Para Raider 501/BJ	Pasal 288 ayat (2) UU RI tahun 2009	3-P/PM.III-13/AD/XI/2019 15/11/2019	BHT 27/11/2019
40	11/12/2019	4-P/PM.III-13/AD/XII/2019 11/12/2019	pada hari Selasa tanggal Sembilan belas Nopember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 15.30 Wib	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Budiyono Serka 21080799691185 KODIM 0804 MAGETAN	Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 2009	4-P/PM.III-13/AD/XII/2019 16/12/2019	BHT 24/12/2019
41	11/12/2019	5-P/PM.III-13/AD/XII/2019 11/12/2019	hari Selasa tanggal sembilan belas Nopembdr tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul Lima Belas Empat Puluh lima WIB.	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Jiran Serda 310602414800684 Denpal v/1 madiun	PASAL 288 AYAT (2) UU RI tahun 2009	5-P/PM.III-13/AD/XII/2019 16/12/2019	BHT 24/12/2019
42	11/12/2019	6-P/PM.III-13/AD/XII/2019 11/12/2019	hari Selasa tanggal sembilan belas nopember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul lima belas tiga puluh WIB.	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Gobin Arrosid Kopda 31040261370882 Korem 081/DSJ	Pasal 288 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009	6-P/PM.III-13/AD/XII/2019 16/12/2019	BHT 24/12/2019

43	11/12/2019	7-P/PM.III-13/AD/XII/2019 11/12/2019	Pada hari Selasa tanggal sembilan belas nopember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul lima belas tiga puluh tiga WIB	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Nurkholis Serda 31060303430884 Korem 081/DSJ	Pasal 288 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009	7-P/PM.III-13/AD/XII/2019 16/12/2019	BHT 24/12/2019
44	11/12/2019	8-P/PM.III-13/AD/XII/2019 11/12/2019	pada tanggal dua puluh sembilan oktober tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 07.00 WIB	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Supriyanto Praka 31040219140383 Kodim 0813 Bojonegoro	Pasal 288 ayat (2) UU RI nomor 22 tahun 2009	8-P/PM.III-13/AD/XII/2019 16/12/2019	BHT 24/12/2019
45	11/12/2019	9-P/PM.III-13/AD/XII/2019 11/12/2019	pada hari Selasa tanggal sembilan belas nopember tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 15.26 WIB	Kep/650/VIII/2011 19/08/2011	Agus Supriyanto Serda 31040199180482 Korem 081/DSJ	pasal 285 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009	9-P/PM.III-13/AD/XII/2019 16/12/2019	BHT 24/12/2019

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)



Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Exellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III -13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (Excellent) Nomor TAPM.03-MIL/QMR/SERTIFIKAT/10/2017 yang ditandatangani oleh Dirjen

Badilmiltun MARI. Pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

Selain itu, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 04 April 2017 telah dinyatakan lulus sertifikasi dan berhak mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 (*Quality Management System* / Sistem Manajemen Mutu) oleh National Quality Assesment / NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.

ISO (*International Organization for Standardisation*) merupakan Badan Penerbit Stadard Internasional yang berdiri tahun 1947 dan berpusat di Geneva-Swiss yang beranggotakan 173 negara.

Untuk meraih serifikat ISO bukanlah pekerjaan mudah, melainkan memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kerjasama semua pihak. Pihak manajemen, MR dan semua Pegawai harus punya kesadaran yang sama untuk melaksanakan pelayanan prima.

Tujuan Penerapan ISO adalah :

✓ **Kepuasan Publik.**

Bahwa Sistem Manajemen Mutu dapat memperlihatkan bukti-bukti pelayanan prima yang berstandar internasional, dan diakui dunia. Pelayanan disemua bidang akan berjalan dengan baik dan tertib. Pelayanan ini akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan atau siapa saja yang memerlukan informasi dan jasa Pengadilan Militer III-13 Madiun, dan konsumen tentu akan merasakan kepuasan.

✓ **Perubahan.**

Bahwa pelayanan kepada masyarakat sebelum menerapkan ISO tentu akan berbeda jauh, dengan sistem pelayanan setelah

menerapkan sistem Manajemen Mutu. Perubahan ini timbul perasaan tanggung jawab, dan menyadari akan pentingnya ISO dan akhirnya berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik ini dijalankan tidak hanya sesaat, melainkan dilakukan terus menerus.

1) Posbakum

Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak mendapatkan alokasi Anggaran Posbakum

2) Sidang keliling / pelayanan terpadu

Salah satu Visi dan Misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan” untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2019 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling yaitu di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari 11 (sebelas) perkara dari 11 (sebelas) perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 9 (sembilan) perkara dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 40.942.150,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

3) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan secara Cuma-Cuma (Prodeo).

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme layanan pemberian bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan kecuali Pengadilan Militer, karena untuk layanan hukum di Pengadilan Militer bagi Prajurit di jajaran Mabes TNI oleh Babinkum TNI dan bagi Prajurit diluar Mabes TNI di Satuan / Dinas Hukum masing-masing Angkatan.

